

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan kepariwisataan secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dirumuskan mengenai arah kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional. Pada pasal 2 ayat (8) disebutkan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan: 1) dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan, 2) dengan orientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, 3) dengan tata kelola yang baik, 4) secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, dan 5) dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan prinsip pariwisata yang dilaksanakan dengan menerapkan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta dan kelompok masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, urusan pariwisata bukan merupakan urusan wajib tetapi urusan opsional, tetapi sumbangan yang diberikan pada kemajuan perekonomian di suatu daerah sangat menentukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Damanik (2005), kegiatan pariwisata selalu memberikan *multiplier effect* bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif lainnya, disamping itu pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menanggulangi kemiskinan. Sebagai akibat lebih lanjut pariwisata dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah.

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting untuk berkontribusi pada pendapatan nasional, selain itu sektor pariwisata juga mampu menjadi alternatif untuk membangun lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat (Zaenuri, 2018). Pariwisata yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar obyek wisata. Wisata yang bersifat konvensional seperti wisata alam, buatan dan budaya dianggap sudah biasa. Perlu adanya wisata alternatif yang bersifat edukatif dan meningkatkan kompetensi para wisatawan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat (Zaenuri, 2018).

Aspek ekonomi pariwisata tak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti Perhotelan. Restoran dan agen penyelenggaraan paket wisata. Ada juga beberapa kegiatan lainnya yang berhubungan erat dengan kepariwisataan seperti transportasi, telekomunikasi dan bisnis eceran. (Suwantoro,35). Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka penanganan yang baik sangat diperlukan dalam pengelolaan objek wisata itu sendiri.

Gunn (1994), menjelaskan bahwa perencanaan dan pengembangan kawasan wisata sebagai suatu unit lanskap tidak dapat dihentikan oleh batas kota, harus mengikuti arah area geografis termasuk komunitasnya. Pengembangan daerah tujuan wisata harus memperhatikan semua sumberdaya alam dan budaya, serta lingkungan agar tidak terjadi degradasi. Pengembangan kawasan wisata harus selalu melindungi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam, kualitas lingkungan, sumberdaya manusia, dan sumberdaya budaya karena penting sekali bagi keberhasilan wisata, selain itu juga harus menonjolkan kualitas asli atau lokal dari suatu tempat.

Rencana pengembangan Pariwisata diperlukan oleh pihak sebagai pedoman dalam mengembangkan aktivitas dibidang masing-masing. Rencana Pengembangan dimaksud harus sesuai rencana-rencana pembangunan pada sector-sektor lain dan tetap konsisten dengan rencana pembangunan kepariwisataan nasional secara keseluruhan.

Sebagian kekayaan di sumber daya alam dan budaya merupakan aset potensial bagi pengembangan kepariwisataan, diketahui bahwa kepariwisataan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan relatif cepat dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat serta menstimulir sektor produksi lainnya. Kegiatan ini juga merupakan alternatif untuk meningkatkan pendapatan langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat lokal/ setempat (Nurisjah et al.2003).

Pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat yang perlu dilakukan secara arif dan bijak, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, karena ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sementara permintaan terhadap sumber daya alam tersebut kian meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan beragam.

Maka untuk itu perlu dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu oleh instansi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, dengan cara memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan semua itu, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development–UNCED*) di Rio de Janeiro, tahun 1992, tdi hasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan agar dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Potensi wisata yang menarik di Indonesia terletak pada keunikan hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi berada di pegunungan dan disepanjang sungai-sungai besar di Indonesia serta pada kebudayaannya yang menarik, Satu dari kekayaan wisata ini berada di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Potensi wisata ini belum sepenuhnya tereksplorasi secara optimal namun memungkinkan untuk lebih dikembangkan, akan tetapi harus ada rencana seksama dan disertai pemahaman sepenuhnya mengenai kondisi objek dan pengetahuan tentang hubungan antara objek wisata tersebut dengan lingkungan sekitarnya.

Kabupaten Sintang sendiri merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas Kabupaten Sintang yaitu 21.635 Km . Jarak Kabupaten Sintang dengan Ibukota Provinsi yaitu 395 Km, secara administratif wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa, Kecamatan terdiri dari Kecamatan Sintang, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km (29,52 %) dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing-masing Kecamatan lainnya hanya 1-9 % dari luas Kabupaten Sintang, adapun Kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sintang seluas 277,05 KM (1,28 %).

Taman Wisata Alam Bukit Kelam merupakan salah satu di kawasan konservasi yang berstatus Hutan Wisata Alam. Terletak di Kabupaten Sintang, ±15 Km dari Kota Sintang. Dan mempunyai luas kawasan 520 Ha, penunjukan kawasan sebagai Taman Wisata Alam oleh pemerintah pusat yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 594/KPTS/92 pada tanggal 6 Juni 1992, menetapkan Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam sebagai Taman Wisata. Pencapaian kawasan atau aksesibilitas dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum (Bus) atau kendaraan pribadi. Pembangunan dibidang pariwisata di Kabupaten Sintang, khususnya pada Wisata Alam Bukit Kelam masih sangat perlu untuk dikembangkan seperti diatur dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2010 Kabupaten Sintang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang yang mana wisata alam Bukit Kelam merupakan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang.

Secara filosofis, suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk dapat memberikan 3 dimensi manfaat, yaitu manfaat ekologis, manfaat ekonomi dan manfaat sosial (Widada 2008). Keberadaan TWABK justru sering dianggap sebagai sumber masalah atau konflik antar berbagai pihak. Untuk menyelaraskan antara fungsi dan potensi sumberdaya alam yang terdapat di kawasan TWABK dengan aktivitas manusia dan pembangunan, perlu dirancang strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan TWABK dengan memperhatikan fungsi dan manfaat kelestariannya serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pengelola kawasan konservasi dituntut kemampuannya mengangkat keunikan dan kekhasan kawasan dan mengemasnya dalam suatu produk yang selaras dengan kecenderungan pasar tanpa mengabaikan fungsi perlindungan kawasan (Sekartjakrajini 2009).

Pada umumnya masyarakat mendukung upaya pengembangan TWABK sebagai kawasan wisata. Masyarakat sekitar kawasan yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani sawah, dan berkebun dengan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan SD, mengharapkan pengembangan TWABK akan membuka kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Keberhasilan pengelolaan banyak tergantung pada kadar dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sekitarnya. Di tempat di mana kawasan yang dilindungi dipandang sebagai penghalang, penduduk setempat dapat menggagalkan pelestarian. Tetapi bila pelestarian dianggap sebagai suatu yang positif manfaatnya, penduduk setempat sendiri yang

akan bekerjasama dengan pengelola dalam melindungi kawasan dari pengembangan yang membahayakan (MacKinnon *et al.* 1990).

Di Kecamatan Kelam Permai yang ada di Kabupaten Sintang ini memiliki banyak objek wisata yang menarik diantaranya objek wisata rohani yang terletak di desa merpak dan rumah betang yang memiliki potensi untuk dikembangkan , terletak di desa Kebong yang merupakan Wisata Alam Bukit Kelam. Taman wisata alam bukit kelam sendiri memiliki keistimewaan yaitu merupakam bongkahan batu terbesar di dunia dengan ketinggian 1.002 meter dan memiliki sarana panjat tebing (rock climbing). Daya Tarik Bukit kelam ini tidak hanya karena terbentuk batu yang sangat besar, tetapi ada cerita menarik di balik bongkahan batu besar itu. Bukit kelam ini juga memiliki beberapa species tanaman endemic seperti kantong semar dari species *Nepenthes Clipeata* serta tanaman anggrek hitam dari species *Coelogyne Pandurata*.

Selain pemandangannya yang sangat eksotik Bukit kelam memiliki keindahan, keunikan dan khas serta dengan keanekaragaman flora dan fauna, sangat potensial bagi pengembangan Wisata. Di kecamatan kelam juga memiliki kultur budaya ,adat istiadat masyarakat asli serta beberapa peninggalan sejarah masalalu . hal ini sangat berpotensi dalam menarik wisatawan berwisata dan sejarah.

Kawasan Taman wisata alam Bukit Kelam pada saat ini memiliki sarana dan prasana yang sudah memadai seperti jalan untuk menuju ke wisata bukit kelam dapat di katakana cukup baik,Akan tetapi terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu pembenahan dan evaluasi lebih lanjut keberadaan dan ketersediaannya untuk menunjang wisata di TWABK. Sarana dan prasarana pariwisata merupakan fasilitas yang memungkinkan proses kegiatan pariwisata berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan berwisata.

TWABK merupakan satu-satunya kawasan wisata berupa bukit batu dengan segala keunikannya di Kabupaten Sintang. Obyek wisata sejenis dalam radius 50 km tidak ditemukan yang menyerupai TWABK. Pengembangan TWABK perlu memperhatikan keberadaan obyek wisata lain yang sejenis/tidak sejenis di sekitarnya sampai radius 50 km, agar dapat dikemas sebagai suatu paket wisata sehingga saling menunjang kunjungan. Di sisi lain keberadaan obyek wisata lainnya yang sejenis/tidak sejenis merupakan saingan bagi TWABK. Keberhasilan pengembangan TWABK sebagai obyek wisata ditentukan pula oleh persaingan antar obyek wisata sejenis.

Demikian halnya dengan objek Taman Wisata Alam Bukit Kelam (TWABK) yang masih dalam tahapan perkembangan, masih sangat dibutuhkan sebuah penelitian yang secara substansial membahas tentang Collaborative Governnance dalam mengembangkan objek Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan diharapkan dapat membantu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Objek Taman Wisata Alam Bukit Kelam.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi antara Dinas Pariwisata kota Sintang, BKSDA dan Masyarakat yang ada di sekitar TWA Bukit kelam dalam mengelola atau mengembangkan Obyek wasata Bukit Kelam.

C. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Menjadi sebuah informasi bagi Akademisi yang tertarik pada pengembanga wisata, khususnya desa wisata yang sedang dalam upaya melakukan kolaborasi.
- b. Sebagai tambahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut.

- a. Bagi masyarakat setempat, dapat menambah wawasan tentang pentingnya koordinasi dalam pengembangan desa wisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyakat.
- b. dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kantor dinas pemuda, olahraga dan pariwisata di kabupaten sintang untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan kepariwisataan di kabupaten sintang, dan dapat dijadikan sumber informasi sekaligus masukan untuk berperan atau berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata di kabupaten sintang.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kolaborasi antar stakeholder dalam mengembangkan obyek wisata TWA Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ?

E. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1. 1

No	Judul penelitian dan peneliti	Jenis penelitian	Temuan dan kesimpulan
1.	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Edukatif Jogja Exotarium Di Kabupaten Sleman Tahun 2019. ARIF RAHMAN HAKIM	Metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman adalah pihak pemerintah sebagai kontrol atas pengelolaan wisata edukasi, masyarakat sebagai karyawan, dan pihak swasta sebagai pengelola wisata tersebut. Proses collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi dengan 5 indikator yang digunakan untuk mengukur collaborative governance sudah baik, akan tetapi kolaboratif yang dilakukan tingkatnya masih awal yang artinya merugikan pemerintah, karena pemerintah belum bisa ikut campur terlalu jauh dalam pengelolaan wisata tersebut. Padahal jika sudah berbagi resiko dan ada keterlibatan pemerintah secara implementasi, akan menguntungkan pihak pemerintah.
2.	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul. Dimas Adi Putra (2018).	Deskriptif kualitatif	Setelah dilakukan penelitian Collaborative Governance Dalam Pengelolan Obyek Wisata Goa Pindul (Studi Kasus Bumdes Maju Mandiri Dan Kelompok Sadar Wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul 2017-2018) terkait keberhasilan kolaborasi sudah bisa berjalan sesuai indikator namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaanya seperti komitmen

			terhadap tujuan, tingkat kepercayaan antar stakeholder, akses terhadap sumberdaya.
3.	Collaborative Governance dalam pengelolaan kawasan malioboro . Ayu sulistiyoningsih 2013	Metode eksplorasi	Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada beberapa evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan insitas <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan kawasan Malioboro. <i>Pertama</i> perlu meningkatkan SDM dalam segi kualitas dan kuantitas pegawai UPT Malioboro . karena selama ini jumlah ini jumlah karyawan UPT sungguh tidak sebanding dengan jumlah masyarakat (Paguyuban) sehingga proses penyaringan aspirasi/input dari masyarakat dapat maksimal. <i>Kedua</i> perlu meningkatkan partisipasi masyarakat (paguyuban) dalam proses pengelolaan kawasan. <i>Ketiga</i> perlu adanya pemberian insentif bagi LPKKM dan Paguyuban yang aktif berperan dalam pengelolaan kawasan malioboro guna meningkatkan kinerja dari pihak-pihak terkait.
4.	Pengelolaan Pariwisata Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman) Muchammad Zaenuri , Tunjung Sulaksono (2015)	Deskriptif Kualitatif	Dalam riset ini mendapatkan penemuan tentang gimana kerja sama yang terjalin antara pemerintah, swasta serta warga dalam mengelola pariwisata- bencana. Sehabis dicoba analisis yang didasarkan pada riset di lapangan bisa diperoleh penemuan tentang kebijakan pariwisata-bencana di Kabupaten Sleman, profil kunjungan turis serta obyek wisata yang tercantum dalam pariwisata- bencana. Dengan memakai kerangka analisis collaborative governance bisa diperoleh cerminan tentang model pengelolaan pariwisata- bencana yang didasarkan pada shared vision serta partisipasi. Kelanjutan dari tahapan dalam collaborative governance merupakan kerja sama dalam jejaring(network) serta kemitraan(partnership).
5.	Tata Kelola Pariwisata Halal Dalam Perspektif Collaborative	Dekskriptif kualitatif	riset ini menampilkan kalau pemerintah wilayah dalam perihal ini, Dispar NTB serta para stakeholder sudah

	<p>Governance (Studi Kasus Kota Mataram Dan Lombok Timur) Pathurahman (2018).</p>		<p>melaksanakan sebagian proses dalam melaksanakan pariwisata halal di Lombok. Starting condition dalam perihal ini Pemerintah wilayah membagikan sesuatu gagasan dini terpaut pariwisata halal serta direspon oleh para stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif dalam perihal ini pemerintah wilayah berupaya membagikan serta memfasilitasi kebutuhan dari program pariwisata halal kepada para stakeholder, Desain institusional dalam perihal ini pemerintah wilayah ataupun Dispar NTB memakai dasar kebijakan perda nomor 2 tahun 2016 bagaikan acuan dalam program pariwisata halal, Proses kerja sama dalam perihal ini Dinas pariwisata NTB melaksanakan pertemuan dengan para stakeholder buat mangulas menimpa implementasi dari perda nomor 2 tahun 2016 terpaut dengan pariwisata halal. Ada pula anjuran pada riset ini 1) Memperjelas ketentuan dasar yang digunakan dalam proses kerja sama supaya dapat diterapkan pada keadaan pariwisata halal yang sempurna. 2) Tingkatkan koordinasi dengan para stakeholder supaya program pariwisata halal berjalan dengan optimal. 3) Pemerintah Wilayah diharapkan tingkatkan koordinasi dengan mengaitkan pihak aparat keamanan dalam melindungi kenyamanan turis. 4) Pemerintah Wilayah serta para stakeholder yang melaksanakan pariwisata halal diharapkan tingkatkan koordinasi dengan Dinas kebersihan hendak membagikan sarana terpaut dengan kebersihan yang terdapat di obyek wisata.</p>
<p>6.</p>	<p>Upaya KBRI Bangkok dalam mendukung kemajuan Pariwisata Indonesia. Faris Afif (2018)</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Dari pembahasan maka dapat diketahui bahwa upaya KBRI Bangkok dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Thailand ke Indonesia diwujudkan melalui implementasi diplomasi lunak (soft diplomacy) dengan</p>

			berbagai pembangku kepentingan pariwisata Thailand dalam lingkup Government to Government dan Government to Bussines. Kemudian upaya selanjutnya dijalankan dengan membangun kerjasama antara Indonesia dan Thailand dalam menciptakan konsep pariwisata moderen, serta melalui kerjasama antara swasta dengan swasta dan pemerintah dengan pemerintah
7	Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Obyek Wisata Puncak Becici Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018. MERLIN APRILIANA PUSPITA DEWI (2019).	Deskriptif kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici sangat baik pada pengelolaan Sumber Daya Alam dimana kelestarian di Obyek Wisata Puncak Becici sangat dijaga oleh pengelola yang didampingi RPH Mangunan. Keterlibatan Dinas Pariwisata DIY yaitu memberikan fasilitas dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan peran dari masyarakat yaitu sebagai actor utama dalam pengelolaan tersebut dimana terdapat dua kelompok yaitu tim pengelola dan penyedia jasa. Akan tetapi di Obyek Wisata Puncak Becici belum melibatkan Pemerintah Desa dan juga pihak Swasta.
8	Kebijakan Pemerintah Kalimantan Barat Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pada Tahun 2016-2018. Aulia Ilma, S.IP (2018).	Deskriptif kualitatif	Kebijakan pemerintah Kalimantan Barat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 hingga 2018 ini berhasil dalam melaksanakan beberapa kebijakan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2016 hingga 2018 ini mengalami peningkatan.
9	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Usaha Pariwisata Dan Sarana Pendukung Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penelitian kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung dan jumlah obyek wisata berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Didapatkan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi sebesar 0.774 terhadap

	Sektor Pariwisata Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2008-2015. Siti Rohani (2017).		jumlah kunjungan wisatawan ($\ln X_1$), 0.527 terhadap jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung ($\ln X_2$), 0.933 terhadap jumlah obyek wisata ($\ln X_3$).
10.	<p>MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS INDIGENOUS TOURIS</p> <p>Mochamad Rozikin, Rendra Eko Wismanu & Andhyka Muttaqin (2019).</p>		<p>Pengembangan sektor pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah. Potensi daerah dibidang pariwisata yang menjadi perhatian bagi pemerintah saat ini yaitu lebih pada potensi kekayaan alam, kekayaan ragam kuliner, pertumbuhan wisata buatan, penguatan wisata budaya dan kearifan lokal. Potensi wisata unggulan tersebut masih memiliki bentuk lain jenis pariwisata yang dapat dikembangkan. Bentuk dan jenis potensi wisata yang beranekaragam ini dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, melalui kolaborasi atau kerjasama oleh semua pihak atau dengan kata lain melalui Collaborative Governance. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, pelaku swasta, pihak akademis, Non Governmental Organization (NGO) dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Pada saat ini banyak negara telah berupaya mengemas pariwisata yang dapat memberikan perbedaan dan daya saing yang kuat terhadap negara-negara lain, yaitu melalui dasar pola pengembangan pada sektor budaya dan kearifan lokal. Pengembangan pariwisata berbasis pada budaya dan kearifan lokal ini dengan kata lain dapat disebut dengan pengembangan pariwisata berbasis Indigenous Tourism. Pengembangan potensi pariwisata daerah yang berbasis pada indigenous tourism merupakan pilihan baik dalam meningkatkan daya saing disisi dimensi nilai pada konsep governance, hal ini yang menjadi dasar</p>

			mengenai model collaborative governance dalam analisis pengembangan potensi pariwisata berbasis indigenous tourism.
--	--	--	---

F. KERANGKA TERORI

1. Governance

Governance berbeda dengan government (pemerintah), dalam arti sempit governance adalah sebagai lembaga, tetapi governance dalam arti yang luas adalah proses pemerintahan (Dwipayana dkk,2003:8). Dalam konteks government lebih diartikan sebagai “mereka” sedangkan governance lebih diartikan sebagai “kita”, dalam hal ini konteks government dilihat seolah-oleh hanya pemerintah atau politisi yang dapat mengatur, melaksanakan sesuatu, dan memberikan sebuah pelayanan, akan tetapi jika dilihat dari konteks governance atau “kita” memberikan penjelasan bawasanya terdapat peleburan antara yang “memerintah” dan yang “diperintah” karena governance ini melibatkan semuanya dalam berbagai proses governance. Konsep governance itu sendiri menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagai salah satu aktor yang ikut dalam proses governance dan tidak harus menjadi aktor yang paling menentukan, dalam implikasinya peran dari pemerintah penyedia pelayan publik atau pembangun infrastruktur yang bisa jadi akan bergeser menjadi pendorong sebagai pihak yang memfasilitasi pihak lain atau sektor swasta yang memiliki peran 10 aktif dalam mewujudkan upaya kebijakan atau program tersebut (Sumarto, 2004:2)

(Keban, 2008:38) menjelaskan governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Serta menurut (Kapucu, Naim; Farhod Yuldashev, and Erlan Bakiev , 2009:45) Governance adalah sebuah proses pembuatan keputusan dengan melibatkan aktor state dan nonstate. Governance memandu proses yang mempengaruhi keputusan dan prosedur dalam sektor privat, publik dan sipil.

Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Sedarmayanti,2003:5) berpendapat Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Karena itu instusi dari governance meliputi 3 intitusi yaitu sebagai berikut: State (pemerintah), Society (masyarakat), dan Private Sector (sektor swasta atau dunia usaha).

Dwiyanto (2005: 79-81) Menjelaskan bahwa *governance* adalah pelaksana fungsi governing yang secara bersama-sama pihak pemerintah dengan pihak instansi-instansi lainnya seperti LSM, perusahaan dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, ataupun pelaksanaan program maupun kebijakan publik hal ini menunjukan bawasannya kekuasaan tidak hanya dimiliki pemerintah atau menjadi urusan dari pemerintah. Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Sedangkan menurut bevir dalam Zaenuri (2016: 20) menjelaskan bahwa *governance* adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi beberapa spek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan aktivitas pemerintah dari negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Publik. Ada beberapa dimensi penting dari *Governance*.

Dwiyanto dalam (Nurhaeni, 2010:25-26) menjelaskan bahwa dimensi pertama dari *Governance* adalah dimensi kelembagaan, yang menjelaskan bahwa *Governance* merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dan upaya untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Dimensi kedua dari *governance* adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Nilai administrasi publik yang tradisional seperti efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk tercapainya tujuan dan menyelesaikan masalah bersama.

2. Collaborative governance

Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. CIFOR/PILI, dalam Haryono (2012: 7).

Menurut (Haryono 2012: 48). menggambarkan bahwa kolaborasi adalah sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Dalam artikel ini kolaborasi di artikan sebagai kerja sama ,kebersamaan, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Menurut Sudarmo (2011:102-104) pada umumnya, kolaborasi dipandang sebagai perselisihan yang bisa disebabkan karena banyaknya kebijakan, dan respon dari organisasi terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan yang menjadi isu-isu semakin meluas keranah publik dari batasan norma-norma, kapasitas pemerintah pusat umumnya semakin meningkat serata pada diluar pemerintah daerah atau kota serta inisiatif spontan ditujukan untuk masyarakat luas.

Menurut Agustina (2017: 60-80) *collaborative governance* adalah sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan Ansell dan Gash mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik.

Definisi tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.

f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Menurut Ansell and Gash dalam Putro (2014: 25-30) Collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
- b. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam
- c. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik
- d. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.
- e. Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan regim-regim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
- f. Mobilisasi kelompok kepentingan
- g. Tingginya biaya dan politisasi regulasi
- h. Pemikiran-pemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan
- i. Adanya kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin dipolitisasi) dan kegagalan implementasinya.

Adanya kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata Taman Wisata Alam Bukit kelam dikarenakan kompleksitas dan saling ketergantungan antar instansi. Dalam pengelolaan obyek wisata Bukit kelam tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja karena untuk melaksanakannya melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda seperti keuangan, pelatihan, pemasaran, dan pembinaan sehingga ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan kewenangan masing-masing.

Adanya collaborative governance ini memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk collaborative governance yang bervariasi antara lain: manajemen, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, regulasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai stakeholder yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan.

- a. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

DeSeve (2007: 50) dalam Putro (2014: 29-35) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance, yang meliputi :

1) Jenis struktur jaringan

Mendeskripsikan secara konseptual keterkaitan antar elemen satu dengan yang lain menyatu secara bersamaan untuk menjelaskan beberapa unsur fisik jaringan, yang kaitnya dengan bentuk networked structure, seperti clusture dan spoke yang digunakan.

2) Komitmen Terhadap Tujuan

Komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya teraktulisasikan kedalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

3) Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan

Kepercayaan diantara para partisipan didasarkan pada hubungan professional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stake holder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

4) Governance

Kejelasan dalam tata kelola termasuk boundary dan exclusivity, rules, self determination, dan network manajemen. Boundary dan exclusivity menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang ada di luar jaringan. Rules berkaitan dengan aturan-aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Self determination yaitu kebebasan untuk menentukan bagaimana network atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya. Network management berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa ciri sebuah kolaborasi yang

efektif adalah jika kolaborasi didukung sepenuhnya oleh semua anggota network tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan.

5) Akses terhadap kewenangan

Akses terhadap otoritas yakni tersedianya standar-standar ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dari kebanyakan kolaborasi memberikan otoritas untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan tugasnya.

6) Pembagian akuntabilitas/responibilitas

Pembagian akuntabilitas/responibilitas yakni berbagi governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

7) Berbagi informasi

Yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, software dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

8) Akses terhadap sumber daya

Yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa collaborative governance yaitu struktur organisasi pemerintahan diamanatkan yang secara langsung mengajak pemilik kepentingan dalam membuat keputusan bersama-sama dalam forum yang bersifat normal, ada kebebasan, dan berorientasi pada konsensus yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau asset secara bersama-sama.

3. Pengembangan Pariwisata

a. Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah.

Gunn dalam Taryana (2013) mendefinisikan wisata sebagai suatu pergerakan sementara manusia menuju tempat lain dari tempat tinggal dan bekerja asalnya, selama tinggal ditempat tujuan tersebut melakukan kegiatan dan diciptakan fasilitas untuk mengakomodasikan kebutuhan. Gunn dalam Taryana (2013) juga menyatakan bahwa suatu kawasan dikembangkan untuk tujuan wisata karena terdapat atraksi yang merupakan komponen dari suplai. Atraksi tersebut merupakan alasan terkuat untuk suatu perjalanan wisata, (dapat berupa ekosistem, tanaman langka, landmark, atau satwa) yang dapat ditemukan di perkotaan dan perdesaan. Pariwisata perdesaan tentunya berbeda dengan pariwisata perkotaan baik dalam hal obyek, lokasi, fungsi, skala maupun karakternya yang tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan pengembangannya (Widiyanto et al. dalam Taryana 2013).

Sukmana dalam Taryana (2013) menyebutkan bahwa Desa Wisata merupakan model konsep yang baik dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan nilai lokal. Desa Wisata adalah salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang muncul pada pertengahan tahun 1990. Menurut Spinllane (dalam Fitriana, 2013: 8) pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Definisi atau pengertian pariwisata menurut Mc. Intosh dan Goelder (dalam Fitriana, 2013: 9) mengungkapkan bahwa Pariwisata adalah ilmu atau seni dan

bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan catering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung. Sedangkan menurut Spillane (dalam Fitriana 2013: 9) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensisosial budaya dan ilmu.

b. Jenis dan Bentuk Pariwisata

1) Pariwisata memiliki jenis dan bentuk yang berbeda sesuai dengan potensi yang ada, berikut Jenis dan Bentuk Pariwisata :

a) Jenis Jenis Pariwisata

Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane (dalam Alfira, 2014: 20-21):

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

2) Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. 22 c) Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism). Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain.

3) Bentuk Pariwisata

Secara umum bentuk pariwisata adalah semua yang berhubungan dengan objek yang dapat disaksikan pengunjung pada situasi tertentu dan waktu yang tepat, serta kemauan untuk mengunjungi objek tersebut. Adapun bentuk dan

jenis pariwisata menurut Yoeti (dalam Fitriana, 2013: 13) di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata lokal, pariwisata regional, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.
- b. Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata rekreasi, pariwisata budaya, pariwisata olahraga, pariwisata sosial, pariwisata kesehatan, pariwisata politik, pariwisata keagamaan.
- c. Berdasarkan Pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata yang mendatangkan devisa dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu negara tertentu, pariwisata pasif adalah kegiatan pariwisata yang mengurangi cadangan devisa negara ditandai dengan keluarnya penduduk ke 23 suatu negara lain ke negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan.
- d. Menurut alasannya yaitu seasional tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, occational tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event event tertentu).

c. Pengembangan Pariwisata

Pengertian dasar yang harus diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah mengetahui komponen-komponen pengembangan pariwisata dan hubungan internal di antara komponen-komponen tersebut. Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang di anggap perlu di tata sedemikian baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Menurut Hadinoto (dalam Fitriana, 2013: 18) ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, yaitu:

a. Atraksi Wisata.

Atraksi merupakan suatu daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

b. Promosi dan Pemasaran.

Promosi dan pemasaran merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

c. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata).

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum atau tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

d. Transportasi.

Transportasi mempunyai dampak yang besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

e. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Suwanto (dalam Fitriana, 2013: 19) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, antara lain :

1) Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :

- a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c) Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.
- d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
- e) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain- lain).
- f) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

2) Prasarana Wisata

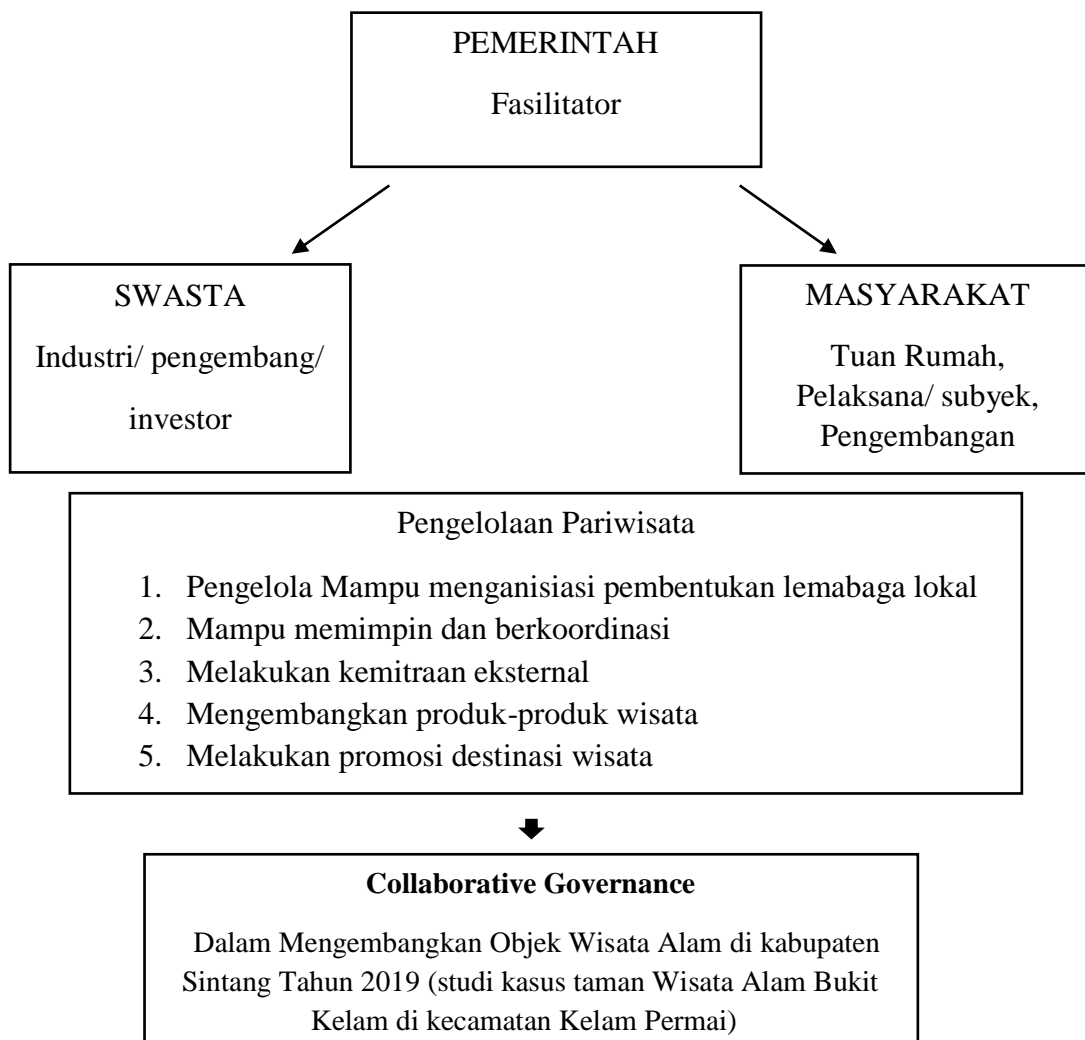
Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

3) Sarana Wisata

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

G. KERANGKA PIKIR

Gambar 1. 1



H. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Kolaborasi Governance

Kolaborasi merupakan suatu upaya untuk melakukan kerjasama yang di dalamnya terdapat beberapa stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing dari instansi agar tercapainya tujuan bersama.

2. Governance

Governance adalah system kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah maupun dari kelompok kepentingan dalam proses formulasi dan implementasi untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah bersama.

3. Pengembangan Pariwisata

Merupakan upaya yang dilakukan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu di tata sedemikian rupa, baik dengan cara memelihara yang sudah di kelola ataupun menciptakan yang baru.

I. DEFINISI OPERASIONAL

Indikator-indikator pengelolaan pariwisata menurut Damanik dan Teguh dalam Penelitian Yumanaraya Noho (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola mampu menginisiasi pembentukan lembaga lokal.
2. Mampu memimpin dan berkoordinasi.
3. Melakukan kemitraan eksternal.
4. Mengembangkan produk-produk pariwisata.
5. Melakukan promosi destinasi wisata.

J. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 23), penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alamidan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari definisi yang sederhana penelitian kualitatif yaitu menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.

Kemudian Menurut Shank (2002) dalam Yusuf (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai sebuah penyelidikan empiris yang sistematis terhadap makna. Sistematis dalam konteks ini mengacu sebagai direncanakan, tertib dan umum serta sesuai dengan aturan.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menggambarkan tentang objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis tersebut dapat berupa dekskripsi kemudian di interpretasi dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat , tepatnya pada Objek Taman Wisata Alam Bukit Kelam , dengan alasan :

- a. Masih belum maksimalnya pengelolaan atau pengembangan yang ada di objek wisata alam bukit kelam.
- b. Taman wisata alam bukit kelam merupakan objek wisata yang menarik dan paling berpotensi untuk dikembangkan di daerah kabupaten Sintang.

3. Unit Analisis

Unit analisis data adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa stakeholder setempat.

Subjek penelitian adalah informan yang memangku kepentingan dalam memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Kepala BKSDA Kabupaten Sintang, Kepala Disporapar Kabupaten Sintang, Kepala Kecamatan Kelam Permai, Kepala Desa Kebong dan pengelola objek wisata alam Bukit Kelam serta masyarakat yang ada di sekitar objek wisata alam Bukit Kelam. Subjek tersebut adalah pemangku kepentingan dalam penelitian ini dan dengan sengaja peneliti pilih sebelum turun ke lapangan dikarenakan peneliti merasa subjek tersebut mampu untuk menjabarkan dan menjelaskan terkait pengelolaan objek wisata alam Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

4. Jenis Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan, peneliti berusaha mencari segala bentuk informasi yang di peroleh dari hasil wawancara kepada sumber yang telah di tetapkan. Data Primer yang digunakan

oleh penulis pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan beberapa instansi sebagai berikut :

Tabel 1. 2

No	Sumber data	Teknik pengumpulan
1.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan barat, Seksi Konservasi Wilayah II sintang	Wawancara
2.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	wawancara
3.	Kantor Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang	Wawancara
4.	Kepala Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang	Wawancara

- b. Data Sekunder ,merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung,baik dari laporan tahunan,dokumen maupun data data yang mendukung lainnya. Data sekunder pada penelitian ini di dapat oleh peneliti melalui internet maupun secara langsung,jurnal,serta arsip yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Jadi data tersebut bukanlah data yang sudah di peroleh oleh peneliti lain atau dari berbagai sumber lain seperti studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet (Sugiyono, 2011).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data (informasi) dari responden dengan cara bertanya langsung. Sebelum melaksanakan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan atau informasi yang akan di cari dan pertanyaan itu nantinya di analisis kembali. Setelah pertanyaan sudah tersedia barulah mencari narasumber yang benar- benar paham, mengetahuin serta ikut terlibat di dalam masalah yang ingin di pertanyakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2012:240). Teknik ini di lakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip pada lokasi penelitian. Dapat berupa buku,Skripsi,Jurnal maupun laporan lain yang menunjang dalam penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan informasi serta memilah mana yang berarti dan mana yang butuh dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga gampang dipahami (Sugiyono, 2007: 333- 345).

Metode analisis data yang digunakan dalam riset ini merupakan analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles serta Hubberman (Sugiyono, 2007:204) ialah pengumpulan data , reduksi data, penyajian data serta langkah terakhir merupakan penarikan kesimpulan. Langkah- langkah tersebut sebagi berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu di catat serta diteliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting ,dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

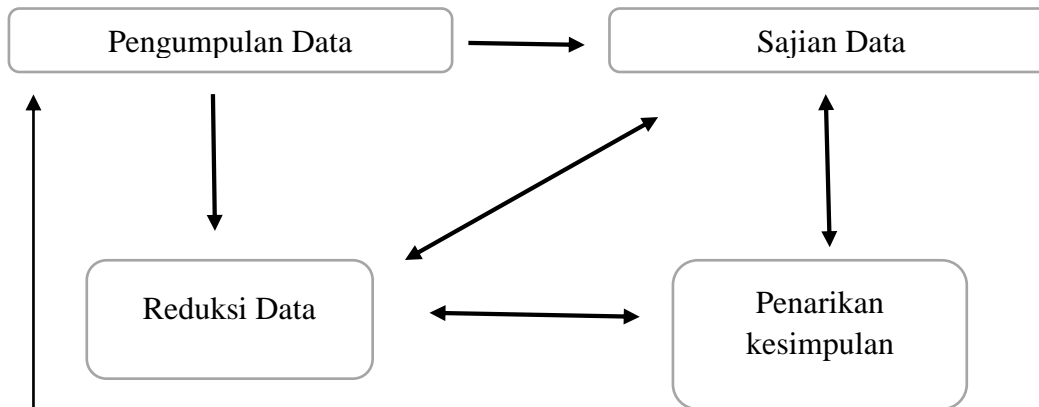
Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan informasi, yang mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan peneliti melakukan interpretasi data yang telah di display. Cara yang dilakukan meliputi perbandingan pengelompokan membuat pola dan melakukan triangulasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data,maka kesimpulan yang kredibel.

Gambar 1. 2



Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberman (sugiyono 2007:333-345)

K. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam Bab I akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.
2. Dalam Bab II akan menguraikan tentang objek peneitian yang akan dilakukan.
3. Dalam Bab III akan menguraikan dan menganalisis Kolaborasi beberapa stakeholder dalam pengembangan obyek wisata Taman Wisata Alam Bukit Kelam.
4. Dalam Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang akan di laksanakan.